

31

Wajah Polisi Hari Ini :  
Titik silang Pak Tjip dengan Pak Kunarto

Sutrisno<sup>34</sup>

*Abstraksi*

*Artikel pendek ini mencoba membedah dua pemikir raksasa kepolisian Satjipto Rahardjo dan Kunarto dari pendekatan Sosiologi Pengetahuan (sociological knowledge). Sebuah pemikiran, layaknya pemikiran sosial dan teori –dalam tradisi sosiologi- disandarkan pada kiblat; marxian dan fungsionalism. Bedah pemikiran ke dua tokoh ini adalah upaya melacak sandaran dua kiblat tersebut dalam menampilkan implikasi-implikasi praksis dunia kepolisian Indonesia.*

\*\*\*

"Polisi harus tahu lebih banyak dan lebih dini dari bangsanya agar dapat memimpin bangsanya dengan selamat melalui perubahan – perubahan dalam masyarakat. Syarat untuk itu adalah senantiasa berada selangkah di depan bangsanya", demikian penggalan yang ditulis Satjipto Rahardjo dalam *Polisi Sipil*. Konon, kutipan tersebut berasal dari jargon polisi Jepang. Andaikan jargon ini dipegang di Indonesia, bukan sekedar kata-kata lepas yang tidak mempunyai bobot ekspresif-imperatif sulit dibayangkan apa yang terjadi dengan polisi hari ini.

Pasalnya, kerana terlalu besar (dan mungkin berlebihan) meletakkan harapan tersebut terhadap polisi. Bisa dicari apologetiknya untuk menjawab mengapa harapan pada jargon di atas terlalu berlebihan. Bahkan apologetik yang mempunyai basis teoritik. Sayangnya, deretan kumpulan artikel yang dihimpun dalam buku ini tidak begitu 'berani' mengangkat kekuatan apologetik teoritik ini. Kini seperti tiba masanya mengkritisi polisi lebih populer ketimbang mencarikan asat – usul yang argumentatif teoritik terhadap hadirnya realitas yang melatar belakang. Sehingga tampaknya mengesampingkan kesan keseimbangan (*fairness*) dalam memberikan

<sup>34</sup>Sutrisno, menyelesaikan studi S2 – Sosiologi dari Universitas Indonesia, pernah sebagai Ketua Pengembangan pada Departemen Sosiologi – The International Institute of Islamic Thought Indonesia yang bermarkas di Virginia. Sekarang Staf Pengajar Sosiologi pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Jakarta.

"dakwaan" terus menerus terhadap polisi. Atau hampir selalu saja polisi menjadi "pesakitan" dalam banyak kesempatan.

#### Pembelaan berbasis teoritik

Jenderal (Purn) Kunarto, mantan orang nomor satu di kepolisian dan ada yang menyebut 'Wali yang ditakdirkan jadi polisi' pernah memberikan ulasan dengan nada "pembelaan" secara elegan. Dalam sejumlah artikel menginventarisir sejumlah poin yang memungkinkan celah bagi polisi dalam penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Pada dasarnya penyalahgunaan wewenang itu terpilah dalam dua bagian besar.

Pertama, penyalahgunaan yang berlingkup internal. Subyek dan obyeknya dalam penyalahgunaan internal ini warga polisi. Sebagian polisi tindakan penyalahgunaan wewenang atau menjadi obyek kemudian harus mengestafetkan keluar, ke masyarakat, dalam rangka menggali dana.

Dalam kerangka inilah muncul salah satu poin penyalahgunaan wewenang yang kedua. Yaitu, penyalahgunaan wewenang yang berlingkup eksternal. Pak Kunarto merinci tindakan *abuse of power* yang berdimensi eksternal hingga terdiri dari tiga belas poin kemungkinan. Diantaranya meliputi bertindak sebagai "*debt collector*" dari orang-orang tertentu yang berpraktek kerja ilegal, manipulasi dan keberpihakan terhadap kemungkinan yang salah menjadi benar, pungli, percaloan, pemerasan, tindakan-tindakan kekerasan. Lantas bagaimana apologetik teoritiknya? Menurut Pak Kunarto, deretan *abuse of power* yang dilakukan oleh polisi ada penjelasannya.

Faktor pertama. Polisi bukan bekerja dalam ruang sosial hampa. Mereka adalah 'anak kandung' masyarakat. Ketika polisi melekat status seseorang, keluarganya – anak dan istrinya – bukanlah polisi, tetapi anggota masyarakat dan layaknya hidup bukan sebagai polisi.

Konflik peran terjadi ketika terjadi tubrukan antara loyalitas kepada korps-nya disatu sisi dengan loyalitas terhadap anggota keluarga dan handai tolan disisi lain, ketika misalnyan anggota keluarga ini harus mengalami persoalan yang berkaitan dengan hukum. Hampir semua pengamat menilai masyarakat Indonesia sebagai sebuah sistem sosial mekanik. Minimal sedang dalam transisi menuju sistem organik. Perdebatan pada wilayah etika sosial yang panjang, masyarakat masih sulit memahami makna kebenaran yang dikandung pada loyalitas lain diluar loyalitas terhadap keluarga dan handai tolan. Keluarga dan handai tolan lebih nyata "hadir" secara fenomenologis ketimbang konsep – konsep abstrak tentang tanggung jawab terhadap negara, patriotisme, nasionalisme dan semacamnya. Atau *tetek-bengek* rumusan kebenaran yang diartikulasikan dalam instrumen kepolisian. Ini lebih merupakan sebuah penjelasan antropologis ketimbang penjelasan sosiologis.

Mudah dimengerti posisi ideal polisi dalam rangkaian konflik peran semacam itu. Tarik menarik antara tugas-tugas hamba hukum dengan tarikan solidaritas intimitas -- istilah yang dipakai Anthony Giddens -- hampir selalu dimenangkan oleh solidaritas intimitas. Inilah barangkali dalam kerangka tesis yang dikembangkan Francis Fukuyama, masyarakat kehilangan modal sosial (*social capital*). Tatanan sosial baru yang telah diformat dalam bentuk mekanik ( baca: modern) hanyalah hadir dalam bentuk format tekstualnya. Bukan aktualnya. Bersama kekuatan sosial impertif, yaitu membengkaknya deferensiasi sosial, sementara intimitas sebagai warisan lama masih bertahan.

Faktor kedua. Hal lain yang dieksplorasi Pak Kunarto dalam mengembangkan apologetik teoritik terhadap lemahnya lembaga kepolisian adalah dengan menginventarisir obyek yang dikenai perilaku *abuse of power* oleh polisi. Mereka adalah anggota masyarakat yang melanggar ketentuan tetapi ingin tidak dihukum, bersalah tetapi ingin jadi pihak yang benar, ingin bantuan keamanan, ingin bantuan menjatuhkan lawan.

Obyek *abuse of power* ini harus dibaca sebuah tarikan (godaan) luar biasa terhadap polisi. Meskipun dari dua pelaku tersebut, antara polisi dan anggota masyarakat dalam *abuse of power* sama sama merupakan simbiosis mutualisma. Kedua-duanya merasa saling diuntungkan. Ada penjual ada pembeli.

Faktor ketiga. Bagi Pak Kunarto perilaku polisi di hadapan hukum merupakan fungsi dari sistem politik suatu masyarakat. Semakin tinggi tingkat demokrasi suatu masyarakat, polisi akan semakin bekerja profesional. Atau, semakin demokratis suatu masyarakat, semakin hormat polisi pada supremasi hukum. "Ada orang bertanya, sebaiknya polisinya yang diperbaiki dulu agar dapat membentuk masyarakat demokratis, atau harus masyarakat demokratis dulu? Jawabannya adalah masyarakat harus demokratis dulu". Disini persoalannya, profesionalisme polisi hanya dapat beroperasi pada ranah demokrasi. Jadi polisi tak pernah ada di depan dalam perubahan sosial.

Mana dulu, telur dengan ayam ?

Sekali lagi, tesis yang dikembangkan Pak Kunarto di atas tampaknya menjadi sebuah tesis klasik. Tesis itu menjadi sebuah pijakan fundamental dalam merangkai bangunan argumentasi dalam mencermati wajah polisi. Polisi muda hari ini akan mengastakan, "Saya adalah seorang kerdil yang mampu menerawang hamparan pemandangan luas layaknya raksasa, karena saya berdiri di pundak raksasa. Raksasa itu adalah Pak Kunarto."

Akan tetapi betapapun luasnya polisi muda ini mempunyai kemampuan menerawang berkat bantuan raksasa, realitas sosial tetaplah bermatra ganda. Yang harus disadari di horizon sebelah mana raksasa ini berdiri; berdiri pada satu sisi akan kehilangan detail yang luput dari pandangan. Mulai saja dari faktor ketiga di atas, bahwa tingkat profesionalisme polisi merupakan fungsi dari tingkat demokrasi masyarakat. Tesis ini meletakkan posisi polisi terbalik dengan pandangan Sutjipto Raharjdo, Pak Tjip, bahwa polisi harus selangkah di depan dari bangsanya. Oleh

karena itu bagi Pak Tjip, demokratisasi mustinya dimulai dari kalangan polisi atau di lingkungan kepolisian.

Siapa yang akan memulai demokrasi kalau bukan dari penegak hukum. Demokrasi mestilah menempatkan hukum di garda depan, siapa pula yang akan menghargai hukum kalau tidak dimulai dari lembaga yang secara formal berperan untuk itu. Bukan politik yang didepan.

Pak Kunarto nampaknya memahami demokrasi sebagai 'peristiwa' politik. Maka demokrasi semata sebuah perjalanan yang berputar putar pada ranah kekuasaan. Setelah politikus beres berbenah diri, polisi – isyaallah -- tidak terombang-ambing diseret rayuan maupun paksaan elit politik. Yang ingin dikatakan "makanya politisi jangan menyeret polisi untuk berselingkuh"<sup>35</sup>. Michel Foucault, Fisuf Perancis sangat berjasa dalam meruntuhkan tesis semacam ini. Kekuasaan, dalam tesis yang dikembangkannya, dalam ranah demokrasi telah meleleh dari pusat tersebar ke "pinggir". Tak ada lagi "pusat" kekuasaan. Haryatmoko, seorang alumnus Universitas Paris IV-Sorbonne berpijak dari tesis Foucault, "...dalam masyarakat modern, pembentukan individu yang berdisiplin tidak hanya dioakukan oleh lembaga – lembaga represif (penjara, polisi), tetapi juga dalam interaksi masyarakat dan semua bentuk kegiatan sosial".

Sementara bagi Pak Tjip, profesionalisme polisi dan persoalannya di sana-sini tidak disandarkan penuh pada kekuatan eksternal. Faktor eksternal memang mempunyai pengaruh, namun cukup dibaca sebagai *environment*. Dibayangkan polisi adalah sebuah institusi mandiri; didalamnya ada seperangkat elemen yang bisa digerakkan, kalau elemen ini digerakkan cukup dari dalam saja. Elemen ini bisa karatan kalau dia tidak dipakai. Elemen-elemen ini dalam terminologi Talcot Parson, sosiolog Amerika, adalah daya atau kekuatan yang dikenal dengan singkatan GILA (*goal, integration, latent pattern maintenance dan adaptation*).

---

<sup>35</sup> Ibid. halaman 37.

Meskipun amat berat memecahkan teka-teki telur dengan ayam dengan cara memenggal begitu saja menjatuhkan pilihan pada salah satunya. Mengingat dikalangan polisi sendiri terdapat persoalan budaya birokrasi yang amat tidak sehat. Ciri-ciri birokrasi modern yang diangankan Max Weber memang (sempat) melekat dikalangan polisi. Tetapi mengalami pembusukan sedemikian rupa melalui persentuhan kulturalnya. Dalam hal ciri herarkhis, misalnya, birokrasi polisi lebih mantap dari rekannya yang lain (kecuali militer). Persoalannya, herarkhis di kepolisian menjadi sebuah '*herarkhisme feodal*', bias dari gagasan asli Max Weber. Titah komandan atau strata diatasnya dipandang sabda suci, tidak memungkinkan kritis dalam merespon. Bahkan tidak peduli perintah itu diluar tata kerja dan wilayah kerjanya. Dalam kontek ini kebenaran (*truth*) bukan dibangun dari aras diskusi yang menjadi saringan uji validitas, tetapi bersifat otoritatif. Sistem semacam ini justru mungkin bisa amat lincah pada sisi menejemen. Namun celakanya akan lebih besar kalau kebetulan pemegang kendali komando sejenis orang yang tidak mencintai kebenaran.

#### Perbedaan Mazhab Teori

Barangkali perdebatan soal mana duluan antara mutu polisi dengan demokrasi merupakan perdebatan panjang berketurunan antara mazhab teori konflik dengan mazhab struktural fungsional. Pak Kunarto adalah seorang pemegang mazhab struktural fungsional. Mazhab ini memahami realitas sosial dengan cara analogi biologi. Elemen-elemen dalam tubuh biologi tidak mungkin dapat berdiri sendiri. Kalau satu anggota tubuh sakit, yang lain akan kena dampaknya. Ibarat pula sebuah sistem yang saling terkait, saling mempengaruhi. Masalahnya, mazhab teori ini tidak mampu mendeteksi dari mana asal – usul datangnya penyakit. Karena datang secara berantai. Totalitas lebih utama dari bagian-bagian, maka ketika harus mendiagnosa penyakit lebih aman menunjuk pada totalitas. Mana lebih dulu antara

demokrasi dengan mutu kinerja polisi; demokrasi adalah totalitas, mutu kinerja polisi adalah bagiannya. Maka demokrasilah yang harus didulukan.

Pak Tjip, hemat saya mempunyai kecenderungan bermazhabkan teori konflik. Meskipun ada perbedaan ritual mendasar dengan teori konflik ortodok yang memulai 'takbir' dengan istilah kelas dan perjuangan kelas. Pak Tjip lebih canggih, faham betul struktur sosial hari ini sudah melampaui zaman ketika teori konflik dilahirkan oleh Karl Marx. Minimal Pak Tjip meramu beberapa mazhab konflik kemudian dipakainya secara simultan (teori eklektik). Misalnya, penjelasannya tentang Polisi Indonesia Ditengah Perubahan Sosial' jelas pengaruh dari Thorstoen Veblen, seorang penganut Marxis yang sinis. Rumusannya tentang Polisi Berwatak Sipil dan Polisi Masa Mendatang berdekatan dengan pengaruh Madzhab Frankfurt ( Adorno, Hokeimer, Hebermas).

---

#### DAFTAR PUSTAKA

- J. Kristiadi (Edt).. *Polisi Mandiri Menengok Ke Belakang Menatap Masa Depan*, Penerbit Panitia Workshop Wartawan Polr i2001
- Jurnal *Basis Edisi Foucault* Tahun 2002, No.01-02, hal.9.
- Satjipto Rahardjo. *Polisi Sipil, Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas 2002., Jakarta, hal. 11.